KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Besok Andika diuji
Tanggal : Jumat, 05 November 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

Besok Andika Diuji

Andika diharapkan bisa membawa reformasi TNI ke tanah Papua.

■ FEBRIANTO ADI LAKSONO, RIZKY SURYARANDIKA

JAKARTA — Komisi I DPR RI memutuskan akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu (6/11). Keputusan jadwal *fit and proper test* tersebut diambil dalam rapat internal yang digelar Komisi I DPR, Kamis (4/11).

"Kita akan mengadakan *fit and proper test* itu hari Sabtu," kata anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11). Bobby mengungkapkan, alasan uji kelayakan digelar Sabtu karena Komisi I sampai kemarin belum menerima penugasan dari Badan Musyawarah DPR.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, *fit and proper test* akan digelar terbuka untuk penyampaian visi dan misi. Kemudian, untuk hal-hal yang sifatnya strategis, rapat digelar secara tertutup. "Besok (hari ini—Red) itu sudah dimulai tahapannya verifikasi administrasi, SPT laporan pajak, LHKPN, dan kelengkapan lainnya," paparnya.

Jika uji kelayakan digelar Sabtu, keputusan Komisi I bisa langsung dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada Senin (8/11). "Kalau misal diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama," kata dia.

Dari sejumlah anggota Komisi I yang menyampaikan pendapat soal uji kelayakan tersebut, persoalan konflik bersenjata di Papua dan Papua Barat selalu mengemuka. "Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut, dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI," kata anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, tentang materi uji kelayakan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, mengiyakan pentingnya isu tersebut. "Pimpinan TNI harus fokus pada tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI," kata Al Muzzammil kepada *Republika*, Kamis (4/11).

Menurut dia, konstelasi politik dalam negeri juga pertahanan serta keamanan regional dan internasional semakin menuntut kepemimpinan TNI yang kuat, bijak, dan cerdas. Dengan itu semua, TNI dapat dipersepsikan dan dirasakan benar-benar mengayomi masyarakat dan mempersatukan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali.

Sejak dua tahun belakangan, konflik di Papua meningkat karena dipicu oleh kian aktifnya pergerakan kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang telah dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Sejauh ini, Operasi Nemangkawi yang dilakukan TNI-Polri belum berhasil menumpas kelompok bersenjata itu.

Konflik terkini adalah saling tembak yang terjadi di Sugapa, Intan Jaya, sejak akhir Oktober lalu. Rumah-rumah warga dibakar, bandara dirusak, dan dua anak tertembak, satu di antaranya meninggal. Menurut rangkuman pihak gereja setempat, sejauh ini sebanyak 5.859 warga masih mengungsi.

BERITA TERKAIT
Masa Jabatan tak Dipersoalkan
Hlm- 9

Sebelumnya, terjadi juga perluasan konflik ke Papua Barat yang ditandai penyerangan Posramil Maybrat. Sebanyak empat prajurit TNI gugur dalam serangan yang dilakukan puluhan orang dengan senjata tajam itu. Menyusul serangan itu, Andika sebagai kepala staf Angkatan Darat (KSAD) mengirimkan tambahan peralatan perlindungan diri dan kendaraan roda dua.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, Amnesty International Indonesia mendata kasus-kasus pembunuhan di luar hukum yang terus terjadi di Papua. "Total 2010 sampai 2021 itu ada 127 kasus dengan 190 korban," kata Usman kepada *Republika*, Kamis (4/11). Hal itu, kata dia, juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga lemahnya peran politik DPR dalam mengawasi dan mengontrol pengerahan alat negara sektor pertahanan, seperti TNI.

Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Warinussy mengatakan, pihaknya berharap Andika dapat membawa perubahan dalam konteks reformasi TNI di Indonesia, terutama di Papua. "Di Tanah Papua, kita berharap ada perubahan dalam kebijaksanaan operasi militer dengan menarik pasukan nonorganik di Tanah Papua," kata Yan kepada *Republika*, Kamis (4/11).

Selain itu, sambung Yan, Andika diharapkan dapat mengedepankan pembinaan teritorial setelah resmi menjabat sebagai panglima TNI. Ia menjelaskan, pembinaan teritorial melibatkan elemen tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam melakukan pendekatan sosial serta damai kepada rakyat Papua.

"Kehadiran Jenderal TNI Andika Perkasa kita harapkan pula dapat memberi perubahan pada penegakan hukum bagi para prajurit yang sering kali melakukan pelanggaran disiplin maupun hukum, dan mengenai masyarakat sipil di Indonesia dan Tanah Papua," ujarnya.

■ Ilon sidebang **ed:** fitriyan zamzami

Baca juga di **republika.id** Pindai QR Code ini